

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU

Orindyah Apriani

NPP. 29.0506

*Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [Orindiaaprilianas@gmail.com](mailto:Orindiaaprilianas@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** The implementation of Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection which has been implemented in Bengkulu City to be precise in Gading Cempaka District since 2016 until now is still constrained by obstacles and problems in it. This is known after the author made observations through direct observation in the field and reading news about the problem, namely: First, there are still high cases of sexual violence against children, Second, there are still high cases of criminality committed by children, Third, there are still high cases of child marriage in Bengkulu City. Executive Director of Cahaya Perempuan woman crisis centre (WCC) Tini Rahayu said that Bengkulu Province is in the top 10 of the highest number of child marriages in Indonesia with 178 cases. **Purpose:** aims to determine the Implementation of the Child-Friendly City Policy in Gading Cempaka District, Bengkulu City, especially implemented by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, factors that hinder the implementation of the Child-Friendly City Policy in Gading Cempaka District, Bengkulu City and the efforts made by the agency to overcome inhibiting factors. **Methods:** This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. The data collection method used in this thesis is by direct interviews with informants as primary data, documentation as secondary data that is seri archives / data contained in the Dinas, and direct observation. The data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** : Based on the results of research that the Implementation of the Child-Friendly City Policy in Gading Cempaka District, Bengkulu City is still not optimal, judging from the existence of inhibiting factors that still affect this, including limited human resources dealing with child protection, low public knowledge about child protection and low socioeconomic conditions that result in problems for children. **Conclusion:** The implementation of the Child-Friendly City Policy in Bengkulu City, especially in Gading Cempaka District, Bengkulu City, has generally gone well although not optimally. The six analytical variables in the Van Metter and Van Horn models succeeded in exposing the weaknesses of the KLA Policy Implementation process. Although Bengkulu City managed to get the primary award three times, behind this success there are still many problems as well as being an obstacle in implementing KLA, especially in Gading Cempaka District, Bengkulu City.

Keywords: Policy Implementation, Child-Friendly Districts/Cities

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang telah dilaksanakan di Kota Bengkulu tepatnya di Kecamatan Gading Cempaka terhitung sejak tahun 2016 hingga saat ini masih terkendala hambatan dan masalah di dalamnya. Hal tersebut diketahui setelah penulis melakukan observasi melalui pengamatan langsung di lapangan maupun membaca berita mengenai permasalahan tersebut adalah : Pertama, Masih tingginya kasus kekerasan seksual kepada anak, Kedua, Masih tingginya kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak, Ketiga, Masih tingginya perkawinan anak di Kota Bengkulu. Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan woman crisis centre (WCC) Tini Rahayu mengatakan jika Provinsi Bengkulu masuk ke dalam 10 besar angka tertinggi perkawinan anak se- Indonesia dengan kasus sebanyak 178 kasus.. **Tujuan:** bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, faktor yang menghambat jalannya Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu serta upaya yang dilakukan dinas tersebut untuk mengatasi faktor penghambat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan wawancara langsung kepada informan sebagai data primer, dokumentasi sebagai data sekunder yang serisi arsip/data yang terdapat di Dinas, dan observasi secara langsung. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu masih belum maksimal, dilihat dari masih adanya faktor penghambat yang masih mempengaruhi hal tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang menangani perlindungan anak, pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak masih rendah dan kondisi sosial ekonomi yang masih rendah yang mengakibatkan permasalahan terhadap anak **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu secara umum sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Keenam variable analisis dalam model Van Metter dan Van Horn berhasil membuka kelemahan-kelemahan proses Implementasi Kebijakan KLA. Meskipun Kota Bengkulu berhasil mendapatkan penghargaan pratama sebanyak tiga kali, namun dibalik keberhasilan tersebut masih banyak permasalahan sekaligus menjadi penghambat dalam mengimplementasikan KLA khususnya di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kabupaten/Kota Layak Anak

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan (Peraturan Presiden Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak). Anak juga merupakan generasi suatu bangsa dan salah satu indikator yang sangat penting untuk menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa yang akan datang serta dalam pembangunan bangsa Indonesia, baik secara nasional maupun daerah. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan yang berbasis hak anak melalui system pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat serta dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan

berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 1 ayat (3). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak menjadi pedoman terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Hal tersebut menandakan bentuk perhatian presiden kepada anak generasi penerus bangsa dengan begitu banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada anak. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tujuan dikebangkannya KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk; kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) pada suatu wilayah Kabupaten/Kota maka secara umum harus dapat memenuhi hak-hak dan melindungi anak secara khusus. Sehingga jika Kabupaten/Kota tersebut telah menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) maka akan bertahap menjadi Provinsi Layak Anak (PROVILA), Indonesia Layak Anak (IDOLA) dan akan mencapai pada tingkatan Dunia Layak Anak (World Fit to Children).

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang telah dilaksanakan di Kota Bengkulu tepatnya di Kecamatan Gading Cempaka terhitung sejak tahun 2016 hingga saat ini masih terkendala hambatan dan masalah di dalamnya. Hal tersebut diketahui setelah penulis melakukan observasi melalui pengamatan langsung di lapangan maupun membaca berita mengenai permasalahan tersebut adalah : Pertama, Masih tingginya kasus kekerasan seksual kepada anak, Kedua, Masih tingginya kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak, Ketiga, Masih tingginya perkawinan anak di Kota Bengkulu. Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan woman crisis centre (WCC) Tini Rahayu mengatakan jika Provinsi Bengkulu masuk ke dalam 10 besar angka tertinggi perkawinan anak se- Indonesia dengan kasus sebanyak 178 kasus.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian sebelumnya merupakan karya tulis ilmiah yang sudah dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan dan referensi serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama oleh Ilham Zulkarnain (2017) dengan hasil penelitian Dilihat dari kondisi perlindungan anak dan penghargaan Kota Layak Anak kategori madya yang diukur dengan indikator Kota Layak Anak dapat disimpulkan bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Gorontalo belum berjalan dengan baik karena adanya indikator Kota Layak. Penelitian kedua oleh Reni Bandari Abdi (2014) dengan hasil penelitian Secara umum sudah baik karena sudah adanya inisiatif pemerintahan setempat yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dalam bentuk Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak. Meskipun pemenuhan hak anak belum optimal karena masih kurangnya komunikasi antar masyarakat dan masih kurangnya sosialisasi.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak oleh Dinas P3AP2KB faktor yang mempengaruhi dan upaya yang dilakukan Dinas P3AP2KB dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada kemudian penelitian ini mengambil lokus Kecamatan yaitu Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

## **1.5 Tujuan**

bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, faktor yang menghambat jalannya Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu serta upaya yang dilakukan dinas tersebut untuk mengatasi faktor penghambat.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan wawancara langsung kepada informan sebagai data primer, dokumentasi sebagai data sekunder yang serasi arsip/data yang terdapat di Dinas, dan observasi secara langsung. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.1 Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu**

Berdasarkan pengalaman yang didapat peneliti setelah melakukan penelitian pada dinas bersangkutan, maka penulis dapat menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bengkulu. Analisis yang dilakukan penulis didasari pada teori yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan pemerintah, yaitu Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2006 : 141-144), dijelaskan bahwa ada beberapa faktor

#### **2.1.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan keikutsertaan Indonesia dalam komitmen dunia menciptakan Dunia Layak Anak. Indonesia memulai komitmen mewujudkan Indonesia layak anak melalui inisiasi KLA yang dimulai pada tahun 2006. Kebijakan KLA dilaksanakan oleh setiap Kabupaten/Kota di Indonesia di bawah, tujuan Implementasi Kebijakan KLA adalah pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pembangunan daerah. Penguatan komitmen bersama dalam upaya mencapai tujuan kebijakan tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Gugus Tugas KLA Kota Bengkulu yang bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam Implementasi Kebijakan KLA di wilayahnya. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Jadi, dari hasil wawancara pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, maka dapat dikatakan proses ukuran dan tujuan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik.

#### **2.1.2 Sumber Daya**

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi, di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut. Maka bila dilihat dari sumber daya yang dimaksud tersebut, dalam Implementasi Kebijakan KLA. Ketiga bentuk sumber daya tersebut memang berpengaruh. *Pertama*, sumber daya manusia, staf merupakan salah satu unsur sumber daya yang paling penting. Hal ini karena staf merupakan penggerak setiap kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan. *Kedua*, sumber daya finansial menjadi unsur yang

penting dalam proses Implementasi Kebijakan KLA. Suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik bila terdapat anggaran yang sesuai dengan rencana kerja atau program kegiatan, anggaran untuk Implementasi Kebijakan KLA di Kota Bengkulu berasal dari APBD. *Ketiga*, sumber daya waktu, jika dilihat dari kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, tidak ada target waktu yang jelas mengenai Kebijakan Kota Layak Anak.

### **2.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana**

Karakteristik agen pelaksana dalam Kebijakan KLA haruslah sinkron satu sama lain, karena untuk mewujudkan suatu kota yang layak bagi anak bukanlah hal yang mudah, semua aspek harus terlibat. Koordinasi adalah yang menjadi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Gading Cempaka. Hambatan tersebut juga mengakibatkan upaya sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang KLA menjadi tidak diprioritaskan. Apalagi sosialisasi tingkat kelurahan kelurahan di Kecamatan Gading Cempaka tentang kebijakan tersebut masih dirasa kurang maksimal oleh pihak masyarakat. Implementasi Kebijakan KLA di Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Gading Cempaka masih dikenal di level SKPD saja, belum di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan lebih kepada lemahnya sosialisasi, terutama tingkat kelurahan di Kecamatan Gading Cempaka.

### **2.1.4 Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Sikap penerimaan dalam Implementasi Kebijakan KLA ditunjukkan Pemerintah Kota Bengkulu dengan ikut membangun komitmen nasional tersebut. Dimulai dari penguatan kelembagaan dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak. Penguatan komitmen KLA ditunjukkan juga dengan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak. Penguatan komitmen dalam upaya mencapai tujuan Implementasi Kebijakan KLA ditunjukkan dengan beberapa Peraturan Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak. Pemenuhan klaster hak-hak anak tersebut telah didukung melalui adanya Peraturan Daerah dan/atau kebijakan sejenisnya.

### **2.1.5 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak- pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya. Dalam Implementasi Kebijakan KLA, koordinasi merupakan peran penting dari setiap pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Karena, Implementasi Kebijakan KLA merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan semua elemen, mulai dari pemerintah setempat, pihak dunia usaha, dan masyarakat. Begitu juga dengan Yayasan PUPA (Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak) yang bertugas untuk membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis sekolah, dengan demikian hal ini diharapkan dapat menghapuskan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa yang akan datang. komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana untuk Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sudah terbilang baik.

### **2.1.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Kondisi sosial

ekonomi masyarakat Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Gading Cempaka yang masih terbilang lemah dan menyebabkan anak menjadi korban kekerasan dalam lingkungan masyarakat bahkan keluarga, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Gading Cempaka sendiri masih tergolong rendah, hal ini mengakibatkan Implementasi Kota Layak Anak tidak sepenuhnya berjalan maksimal. Terakhir tinjauan dari sisi politik tidak memberikan dampak yang berarti terhadap proses Implementasi Kebijakan KLA. Kondisi politik di tengah masyarakat sebagai sasaran kebijakan secara umum kondusif sehingga memudahkan implementor menerapkan kebijakan KLA.

## **2.2 Faktor-faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas DP3A2KB dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu**

Dalam melaksanakan suatu kebijakan pasti memiliki faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Faktor itu bisa pendukung maupun penghambat, begitu pula dalam melakukan upaya Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu juga memiliki kendala, baik yang bersifat mendukung maupun yang bersifat menghambat. Dari hasil penelitian yang dibahas sebelumnya didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu adalah sebagai berikut.

### **2.2.1 Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang Menangani Perlindungan Anak**

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Peran penting tersebut karena sumber daya manusia yang memiliki kewenangan untuk menjalankan atau tidak menjalankan suatu kebijakan. Tidak ada rumus pasti yang menerangkan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan suatu kebijakan. Jumlah sumberdaya manusia yang dibutuhkan hanya disesuaikan dengan tugas yang dilaksanakan. Semakin kompleks suatu kebijakan maka semakin banyak pula sumberdaya manusia yang harus disediakan untuk melaksanakan kebijakan, demikian juga juga sebaliknya. Semakin sederhana kebijakan yang harus diimplementasikan semakin sedikit jumlah sumberdaya manusia yang diperlukan. Berdasarkan pengalaman selama penelitian, jumlah aparatur sipil yang ada sudah cukup untuk melaksanakan perlindungan anak, namun dengan sedikitnya jumlah aparatur laki-laki terutama di staf mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan program di lapangan. Hal tersebut dikarenakan mayoritas aparatur berjenis kelamin perempuan. Namun hal tersebut menjadikan aparatur yang bertugas di Dinas P3AP2KB yang khusus menangani perlindungan anak harus membantu dalam pelaksanaan program kegiatan yang bersifat sangat teknis.

### **2.2.2 Pengetahuan Masyarakat tentang Perlindungan Anak Masih Rendah**

Masyarakat memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Potensi kebijakan untuk berhasil dapat menjadi semakin besar ketika masyarakat memiliki pemahaman lebih baik tentang tujuan kebijakan sekaligus memberikan input. Masyarakat yang memahami mekanisme implementasi kebijakan dengan lebih baik juga dapat terlibat dalam melakukan kontrol. Berkaitan dengan perlindungan anak, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh masyarakat terutama keluarga. Hal ini karena anak masih belum bisa menentukan pilihannya sendiri. Masyarakat harus lebih mengetahui hak-hak yang melekat pada anak untuk dapat menjamin perlindungan terhadap hak tersebut. Masyarakat juga belum memahami bahwa anak memiliki hak yang perlu dilindungi serta dijamin. Masyarakat masih menganggap sebagai hak milik status anak sebagai hak milik memberi peluang kepada orang tua untuk memperlakukan anak menurut keinginan mereka sendiri. Terkadang orang tua malah tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan termasuk dalam kategori perlakuan salah.

### **2.2.3 Kondisi Sosial Ekonomi yang Rendah**

Kondisi sosial ekonomi di Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tergolong masih rendah, hal ini menyebabkan banyak permasalahan terhadap perlindungan anak yang menyebabkan hak anak tidak terpenuhi dengan baik. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak di Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Gading Cempaka juga masih tergolong rendah.

### **2.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian pertama oleh Muhammad Ilham Zulkarnain Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2017 dengan judul skripsi “Implementasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo”. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dengan hasil penelitian Dilihat dari kondisi perlindungan anak dan penghargaan Kota Layak Anak kategori madya yang diukur dengan indikator Kota Layak Anak dapat disimpulkan bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Gorontalo belum berjalan dengan baik karena adanya indikator Kota Layak Anak yang belum terpenuhi Terdapat perbedaan dalam lokus penelitian oleh penulis sebelumnya yang dilakukan di daerah Kabupaten tetapi pada penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan. Selain itu juga Kota Bengkulu mendapatkan penghargaan predikat Kota Layak Anak kategori Pratama, sedangkan Kabupaten Gorontalo mendapat predikat Kota Layak Anak kategori Madya, yang dimana satu tingkat lebih tinggi daripada Pratama Penelitian kedua oleh Reni Bandari Abdi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa fakultas Ilmu Sosial tahun 2014 dengan judul skripsi “Implementasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian deskriptif. Masalah penelitian adalah bagaimana KLA di Kota Tangerang Selatan. Dengan hasil penelitian Secara umum sudah baik karena sudah adanya inisiatif pemerintahan setempat yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dalam bentuk Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak. Meskipun pemenuhan hak anak belum optimal karena masih kurangnya komunikasi antar masyarakat dan masih kurangnya sosialisasi. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Reni Bandari Abdi dengan penulis adalah subjek yang dibahas penulis sebelumnya adalah Kota sedangkan pada penelitian ini sendiri lebih kecil, yaitu wilayah Kecamatan

## **IV. KESIMPULAN**

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu secara umum sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Keenam variabel analisis dalam model Van Metter dan Van Horn berhasil membuka kelemahan-kelemahan proses Implementasi Kebijakan KLA. Meskipun Kota Bengkulu berhasil mendapatkan penghargaan pratama sebanyak tiga kali, namun dibalik keberhasilan tersebut masih banyak permasalahan sekaligus menjadi penghambat dalam mengimplementasikan KLA khususnya di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Hambatan yang dihadapi Dinas P3AP2KB dalam implementasi Kota Layak Anak diantaranya adalah Terbatasnya sumberdaya manusia yang menangani perlindungan anak, Pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak masih rendah. Banyak warga masyarakat yang belum memahami apa yang dimaksud dengan anak, hak anak dan perlindungan anak sehingga banyak terjadi perlakuan salah terhadap anak, dan, Kondisi sosial ekonomi yang rendah mengakibatkan banyak munculnya permasalahan perlindungan terhadap anak yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Bengkulu.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Camat Gading Cempaka Kota Bengkulu, Ketua Yayasan PUPA, Ketua Forum Anak Kota Bengkulu telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Elizabeth, A, Hidayat, Z., 2018. *Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Fithriyyah, M.U., 2017. *Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Syarif Kasim.

Rangkuti, Safitri, Maksun, I.R., 2019. *Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok*. Jakarta: Universitas Indonesia.